

## Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan

Orange Book merupakan kumpulan berbagai buah pemikiran dosen FEM-IPB untuk memberikan sumbangan terhadap permasalahan perekonomian Indonesia secara holistik dan komprehensif. Pemilihan nama orange terkait dengan warna bendera FEM-IPB.

Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia Edisi Kedua merupakan kumpulan tulisan para ekonom Indonesia yang diharapkan mampu memberikan kontribusi substantif, setidaknya dalam enam subjek penting dan beragam perspektif. Kontribusi substantif tersebut dibagi dalam enam bagian besar, yaitu (1) sinergi stimulus fiskal dan percepatan infrastruktur, (2) inklusi keuangan, (3) usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), industri dan persaingan usaha, (4) sumber daya manusia, daya saing dan kemandirian ekonomi, (5) pembangunan pertanian pedesaan, dan daerah tertinggal dan (6) tantangan mewujudkan kesejahteraan. Bagian I dari buku Pemikiran 100 ekonom ini membahas sinergi stimulus fiskal dan percepatan infrastruktur, dengan argumen bahwa pengeluaran ekstra besar untuk percepatan pembangunan infrastruktur masih senantiasa dibayangi sekian macam risiko fiskal. Bagian II membedah inklusi keuangan, karena para ekonom amat peduli pada tingkat suku bunga perbankan di Indonesia yang tercatat amat tinggi, yang tentu amat mempengaruhi akses keuangan, terutama bagi kelompok usaha kecil dan menengah. Bagian III membahas UMKM, industri dan persaingan usaha dengan berbagai spektrum. Hampir semua ekonom sepakat tentang potensi besar UMKM sebagai basis ekonomi, termasuk revitalisasi koperasi sebagai amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum, tantangan UMKM era disrupsi teknologi dan sebagainya. Bagian IV membahas sumber daya manusia (SDM), daya saing dan kemandirian ekonomi, yang juga mendapat perhatian Pemerintah, setidaknya telah tercantum dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Bagian V menyoroti secara khusus pembangunan pertanian pedesaan, dan daerah tertinggal, yang selama beberapa tahun terakhir masih mengandalkan intervensi negara melalui APBN dan terlalu fokus pada program swasembada pajale (padi-jagung-kedelai). Bagian VI atau terakhir membahas beberapa perspektif penting dan tantangan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Para ekonom cukup prihatin terhadap lambannya penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, walaupun kinerja pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen per tahun.

Dalam bab-bab di buku ini disajikan pembahasan yang diperkaya dengan berbagai macam studi kasus terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di negeri Indonesia ini. Dalam pembahasannya juga dikemukakan beberapa Kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam mengatasi masalah yang terjadi serta solusi yang disampaikan beberapa pakar ekonomi yang dapat diterapkan untuk menghadapi permasalahan tersebut.

Ideas for 21st Century Education contains the papers presented at the Asian Education Symposium (AES 2016), held on November 22—23, 2016, in Bandung, Indonesia. The book covers 11 topics: 1. Art Education (AED) 2. Adult Education (ADE) 3. Business Education (BED) 4. Course Management (CMT) 5. Curriculum, Research and Development (CRD) 6. Educational

Foundations (EDF) 7. Learning / Teaching Methodologies and Assessment (TMA) 8. Global Issues in Education and Research (GER) 9. Pedagogy (PDG) 10. Ubiquitous Learning (UBL) 11. Other Areas of Education (OAE)

"Of the major kinds of physical infrastructure, electricity generating capacity has roughly the same marginal productivity as physical capital as a whole. So have roads-plus-rail, globally and in lower-income countries. Telephones, however, and transport routes in higher-income countries, have higher marginal productivity than other kinds of capital"--Cover.

Buku ini memaparkan tentang pemerintahan daerah Kabupaten Puncak di bawah kepemimpinan Bupati Willem Wandik dan Wakil Bupati Repinus Telenggen dalam implementasi program percepatan pembangunan daerah tahun 2013-2017. Buku ini memuat tujuh bab, yaitu tentang konsolidasi pemerintahan daerah baru, pelebagaan pemerintahan daerah, kebijakan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak, kinerja pemerintahan daerah 2013-2017, serta tantangan dan harapan agar proses pelebagaan pemerintahan, percepatan pembangunan, dan pemberian pelayanan publik selama ini dapat meningkat secara berkelanjutan. Bab I menjelaskan tentang konsolidasi pemerintahan daerah baru setelah pemekaran Kabupaten Puncak (periode 2008-2013). Konsolidasi pemerintahan ini penting karena sejak pemekaran tahun 2008, pemerintahan daerah berjalan secara tidak lancar. Tekad para pemangku kepentingan dalam membentuk kabupaten baru memang sudah kuat, tetapi pemerintahan baru tidak segera dapat melembaga dengan baik. Pejabat bupati berganti sampai empat kali. Pemilukada tertunda-tunda beberapa kali akibat terjadinya perang suku pada tahun 2011-2012. Pembangunan daerah belum menunjukkan kemajuan yang berarti dan banyak masyarakat belum dapat mencapai kesejahteraan. Hal ini akibat beratnya kendala struktural pembangunan di Kabupaten Puncak, yaitu keterisolasian wilayah, rendahnya kualitas pelayanan publik dasar, dan rendahnya kualitas SDM. Walau mulai ada pembangunan sarana prasarana perkantoran, rumah dinas pejabat, gedung DPRD, penambahan fasilitas bandara, penambahan frekuensi penerbangan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan migrasi masyarakat dari daerah atau distrik lain ke Ilaga, peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat belum merata. Melihat lambatnya pembangunan, pasangan Willem Wandik-Repinus Telenggen melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan lokal, sehingga mereka akhirnya mengusung keduanya menjadi kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Setelah menang di dalam Pemilukada demokratis pertama pada tanggal 14 Februari 2013, tugas pertama Bupati dan Wakil Bupati definitif adalah menciptakan perdamaian di antara kelompok yang bertikai akibat perang suku seputar Pemilukada tahun 2011-2012. Ada beberapa harapan baru terhadap pemimpin baru, terutama yang berkaitan dengan perlunya konsolidasi sosial-politik paska konflik, perbaikan roda pemerintahan, pembukaan keterisolasian wilayah, peningkatan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Bab II menjelaskan tentang pelebagaan pemerintahan daerah Kabupaten Puncak. Setelah terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif, Willem Wandik dan Repinus Telenggen memulai pelebagaan pemerintahan dengan melakukan konsolidasi birokrasi maupun rekonsiliasi politik. Konsolidasi birokrasi dilakukan di kalangan internal birokrasi dengan membentuk perangkat daerah dan lambang daerah serta penyusunan APBD 2013. Sementara itu, rekonsiliasi politik dilakukan dengan DPRD. Tujuannya supaya Lembaga Eksekutif dan Legislatif dapat bersama-sama mengambil langkah terbaik untuk mempercepat pembangunan di

Kabupaten Puncak, terutama dengan segera diselesaikannya beberapa peraturan daerah yang sangat penting bagi proses pembangunan daerah di Kabupaten Puncak, khususnya Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Lambang Daerah, serta Struktur Organisasi dan Tata-kelola Pemerintahan. Konsolidasi birokrasi dan konsolidasi ini penting karena keterpaduan langkah di antara elemen pemerintahan dan masyarakat bisa berdampak serius terhadap kelancaran tugas pemerintahan daerah. Selanjutnya, tugas Bupati dan Wakil Bupati definitif adalah melakukan aktivasi pemerintahan melalui penataan kelembagaan dan aparatur pemerintah, membangun kerjasama intensif dengan berbagai lembaga pemerintah pusat dan perguruan tinggi, serta meningkatkan kapasitas dan menegakkan komitmen aparatur pemerintah. Bab III menjelaskan tentang kebijakan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak. Buku ini memaparkan garis kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak berdasarkan Master Plan Pembangunan Puncak bidang politik, pemerintahan, dan sosial-ekonomi. Rencana induk ini awalnya disusun pada tahun 2009 melalui kerjasama dengan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan rekomendasi arah dan strategi berikut: memperkuat tatanan sosial-politik, membangun struktur kelembagaan dan aparatur birokrasi pemerintahan, mengembangkan pelayanan publik, serta memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan kondisi permasalahan objektif sebagai wilayah yang terisolir dan tertinggal, Visi dan Misi Pembangunan ditetapkan, khususnya untuk percepatan pembangunan daerah. Visi pembangunan ini dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Puncak 2013-2018: “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Dasar Menuju Masyarakat Kabupaten Puncak yang Damai, Sehat, Terdidik, dan Sejahtera”. Visi pembangunan tersebut dijabarkan dalam lima misi, yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih, dan permukiman; (2) meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat di daerah berlandaskan pada keunggulan dan potensi strategis daerah; (3) meningkatkan ketersediaan, akses maupun kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) meningkatkan kualitas SDM dan komitmen aparatur pemerintah; dan (5) membangun kesadaran kewarganegaraan dan kerukunan hidup antar masyarakat. Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan kebijakan percepatan pembangunan daerah, yaitu pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan infrastruktur pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Bab IV menjelaskan tentang kinerja pemerintahan daerah 2013-2017. Buku ini memaparkan beberapa capaian kinerja, khususnya dalam program penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana penunjang aparatur pemerintah, pengembangan ekonomi masyarakat, dan pengembangan harmoni sosial masyarakat. Pertama, penyediaan infrastruktur dasar dilakukan dengan membangun sarana transportasi udara dan darat, sarana air bersih, BBM dan pembangkit listrik, sarana penunjang aparatur pemerintah, dan sarana permukiman. Kedua, peningkatan pelayanan bidang pendidikan telah dilakukan dengan membuat dokumen Rencana Induk Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Puncak Tahun 2014-2025 melalui kerjasama dengan PPKK Fisipol UGM; pembangunan sekolah terpadu untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Distrik Ilaga; bekerjasama dengan Gugus Tugas Papua UGM melakukan rekrutmen dan penempatan para Guru Perintis - GP (kemudian istilah GP diganti menjadi GPDT - Guru Penggerak daerah terpencil) baik untuk tingkat PAUD, SD, SMP maupun

SMA/SMK; dan pelatihan PNS dan kontrak kerja di lingkungan Dinas Pendidikan. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, Bupati dan Wakil Bupati Puncak periode 2013-2018 memberikan prioritas pada program pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D, Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun fasilitas sosial seperti Posyandu. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan tersebut juga didukung dengan penyediaan tenaga paramedis dan tenaga kesehatan, walau masih belum optimal. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur pemerintah, antara lain penyediaan kantor dinas, pengadaan sarana dan prasarana kantor, dan penyediaan rumah dinas. Keempat, pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Puncak. Beberapa hasil yang dicapai hingga tahun 2017 adalah: penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Publik; Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian; pembangunan Pasar Ilaga; pembangunan Pusat Grosir Ilaga; pemberian subsidi hasil bumi; Gerakan Masyarakat Sejahterakan Kampung (GEMAS); pengembangan perekonomian berbasis pariwisata, khususnya ekowisata pegunungan; dan pengembangan semangat wirausaha putra daerah.

Buku monograf ini kami beri judul 'DISTRIBUSI PENDAPATAN: Konteks Provinsi di Indonesia merupakan hasil riset kami dalam skim penelitian internal fakultas pada tahun 2019 lalu tentang distribusi pendapatan pada 34 Provinsi di Indonesia selama kurun waktu periode 2013-2018. Luaran riset sengaja kami susun dalam buku monograf sehubungan substansi pembahasannya hanya membahas satu topik dalam suatu bidang kompetensi penulis, yaitu topik distribusi pendapatan. Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang salah satunya adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya kesenjangan pendapatan antar individu yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Riset ini sengaja dibuat untuk mengetahui seberapa besar kondisi distribusi pendapatan di Indonesia dan bagaimana variabel investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, investasi pemerintah, inflasi dan pengangguran dalam berkontribusi pada distribusi pendapatan. Harapannya melalui riset ini dapat diketahui secara empiris variabel mana saja yang paling dominan dalam mempengaruhi distribusi pendapatan, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk mengambil skala prioritas kebijakan agar masalah ketimpangan pendapatan yang menjadi penyebab munculnya masalah kemiskinan dapat teratasi.

Impact of international trade on economic development of Indonesia; the case of ASEAN free trade and growth triangles. This paper examines the empirical evidence on the contribution that government and, in particular, capital expenditure make to the growth performance of a sample of developing countries. Using the Denison growth accounting approach, this study finds that social expenditures may have a significant impact on growth in the short run, but infrastructure expenditures may have little influence. While current expenditures for directly productive purposes may exert a positive influence, capital expenditure in these sectors appears to exert a negative influence. Experiments with other explanatory variables confirm the importance of the growth of exports to the overall growth rate.

Provides comprehensive data and analysis on the environmental performance of agriculture in OECD countries since 1990,

covering soil, water, air and biodiversity and looking at recent policy developments in all 34 countries.

World Development Report 1994 examines the link between infrastructure and development and explores ways in which developing countries can improve both the provision and the quality of infrastructure services. In recent decades, developing countries have made substantial investments in infrastructure, achieving dramatic gains for households and producers by expanding their access to services such as safe water, sanitation, electric power, telecommunications, and transport. Even more infrastructure investment and expansion are needed in order to extend the reach of services - especially to people living in rural areas and to the poor. But as this report shows, the quantity of investment cannot be the exclusive focus of policy. Improving the quality of infrastructure service also is vital. Both quantity and quality improvements are essential to modernize and diversify production, help countries compete internationally, and accommodate rapid urbanization. The report identifies the basic cause of poor past performance as inadequate institutional incentives for improving the provision of infrastructure. To promote more efficient and responsive service delivery, incentives need to be changed through commercial management, competition, and user involvement. Several trends are helping to improve the performance of infrastructure. First, innovation in technology and in the regulatory management of markets makes more diversity possible in the supply of services. Second, an evaluation of the role of government is leading to a shift from direct government provision of services to increasing private sector provision and recent experience in many countries with public-private partnerships is highlighting new ways to increase efficiency and expand services. Third, increased concern about social and environmental sustainability has heightened public interest in infrastructure design and performance.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan dan mengelola suatu negara. Walaupun ada berbagai faktor baik itu faktor dalam negeri maupun faktor global yang dapat menjadi faktor penentu. Buku ini terdiri dari 10 (sepuluh) BAB dengan masing-masing bahasan yang berbeda antara lain: Sejarah Perekonomian Indonesia Sistem Ekonomi Indonesia Pelaku Dan Peran Perekonomian Indonesia Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia Sektor Pendanaan Dan Perbankan, Pendanaan, Pembiayaan. Pengentasan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Perekonomian Indonesia Dalam Era Globalisasi Krisis Ekonomi Di Indonesia

Indonesia needs significant additional infrastructure investment to sustain its economic growth. However, the COVID-19 pandemic has further limited the fiscal space of the government. This report proposes a new method to increase infrastructure investment based on the concept of value capture. The report studies how Indonesia's existing policies and regulations can be used to build a value capture framework that ensures the maximization of the social, economic, and environmental value of infrastructure investments. The framework focuses on strategies to deliver infrastructure projects that create greater value and, at the same time, generate funding for up-front investment.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya sinergi dari berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah.

Terwujudnya cita-cita kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu prestasi yang harus dicapai oleh pemerintah. Oleh karena itu, strategi pembangunan daerah harus mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan meningkatkan kualitas daerah melalui pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan selalu mengutamakan peningkatan serta pemanfaatan sumber daya daerah secara terus menerus tanpa melupakan generasi masa yang akan datang. Tujuan dari peningkatan kualitas sumber daya daerah adalah untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang dalam meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Tantangan tersebut tidak menutup kemungkinan akan mengganggu internal daerah jika daerah tersebut tidak siap untuk menghadapinya.

Buku yang berjudul Dukungan Infrastruktur Desa untuk Daerah Tertinggal memfokuskan pada gambaran tentang kondisi umum desa -desa maupun daerah tertinggal, yang menunjukkan bahwa minimnya infrastruktur desa maupun daerah sebenarnya dapat berkembang. Buku ini terdiri atas enam bab, yang masing-masing memiliki fokus dalam memberikan gambaran kondisi daerah tertinggal didekati dengan aspek infrastruktur.

Research on Indonesian laws and regulations on capital investments and its implication on economic development in Tanjung Pinang, Indonesia; case study.

Focusing on pro-poor growth and income poverty, Promoting Pro-Poor Growth: Policy Guidance for Donors identifies binding constraints and offers policies and strategies to address them.

Buku ini berisi pembahasan terkait: perkembangan ekonomi kreatif kini dan masa depan; strategi membangun ruang kreatif; pemetaan dan pengelolaan data ekonomi kreatif; dan strategi membangun bisnis kreatif era digital. Keempat pokok pembahasan tersebut dapat menjadi referensi guna membangun ruang dengan perspektif ekonomi kreatif, terutama untuk meningkatkan kesempatan membangun jejaring dan berkolaborasi dengan pelaku kreatif lainnya baik di tingkat lokal, nasional dan global.

Sixteenth in a series of annual reports comparing business regulation in 190 economies, Doing Business 2019 measures aspects of regulation affecting areas of everyday business activity.

This text maintains a problem and policy oriented approach to development economics. It focuses on people and government in developing countries.

Banyak pejabat daerah hanya memiliki dokumen perencanaan daerah, tetapi tidak peduli substansi perencanaan visi daerah mau dibawa ke mana, dan apa masalah mendasar yang dihadapi oleh daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah membutuhkan identifikasi dan pemahaman: sistem perencanaan pembangunan nasional/daerah; jenis perencanaan; sumber daya yang dimiliki; masalah mendasar yang dihadapi; komoditi/ jasa/ sektor unggulan, arah, dan tujuan yang ingin dicapai; indikator kinerja utama; pembiayaan pembangunan; integrasi dimensi sektoral dan wilayah; serta formulasi visi-misi-strategi. Fokus buku ini adalah bagaimana memanfaatkan teori dan konsep perencanaan untuk membangun ekonomi lokal, kota, dan kawasan. \*\*\*\* “Berbekal pengalaman blusukan ke seluruh wilayah Indonesia, Prof. Mudrajad mampu menyajikan betapa teori perencanaan juga membutuhkan ‘seni’ ketika diaplikasikan di Indonesia yang amat ‘bhinneka’. Studi kasus di berbagai daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditampilkan dalam buku ini memperkaya kita dalam memahami kompleksitas masalah dan beragamnya potensi, menyusun strategi yang membutuhkan kejelian, dan menangkap peluang membangun daerah. “ — Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,

Kabinet Kerja 2014–2019 “Buku teks yang diramu dengan konteks empiris kasuistik ini dimaksud untuk mengisi minimnya buku tentang Perencanaan Daerah yang secara komprehensif-simultan memuat empat aspek (politik, hukum, administrasi, dan fiskal) dengan contoh-contoh aplikasi ‘best practices’ di daerah yang diteliti. Meski cukup tebal, buku ini enak dan perlu dibaca, terutama oleh para birokrat, karena dapat menjadi rujukan praktis dalam perencanaan daerah yang berorientasi pada proses, mulai dari mengidentifikasi dokumen, merumuskan visi-misi, menetapkan kebijakan, memilih strategi, dan mengimplementasikan program untuk membangun ekonomi lokal berbasis potensi unggulannya.” — Sri Sultan Hamengku Buwono X Gubernur Provinsi DIY “Buku ini ditulis dengan sangat komprehensif, yang ditinjau dari beberapa aspek penting, seperti aspek politik, hukum administrasi, dan fiskal, serta disuguhkan dengan contoh-contoh aplikasi kasus perencanaan pembangunan daerah yang dianggap telah berhasil. Membaca buku ini akan menambah wawasan dalam usaha memahami pentingnya perencanaan yang baik dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, buku ini wajib dibaca oleh para praktisi daerah, seperti kepala daerah, anggota DPRD, dan pejabat daerah lainnya.” — Dr. Sinyo Herry Sarundajang Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (2005-2015) & Dubes RI di Filipina

This new edition of this established textbook reflects the rapid developments in the field covering the vast research that has been conducted on panel data since its initial publication. The book is packed with the most recent empirical examples from panel data literature, for example, a simultaneous equation on Crime will be added to chapter 7, which will be illustrated with STATA. Data sets will be provided as well as the programs to implement the estimation and testing procedures described in the book on the web site. Additional exercises will be added to each chapter and their solutions will be provided on the web site. The text has also been fully updated with new material on dynamic panel data models and recent results on non-linear panel models and in particular work on limited dependent variables panel data models.

Pandemi yang disebabkan oleh Covid-19 memberikan dampak yang serius pada berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Berbagai upaya penyesuaian dilakukan agar pendidikan terus dapat berlanjut sebagai proses pewarisan nilai pada generasi berikutnya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersegera mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran secara online dan dilakukan di rumah. Kebijakan tersebut menjadi dasar para penulis buku ini dalam menyoroti pendidikan saat pandemi. Para penulis buku ini, yang merupakan mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan (PAI UAD), menyadari bahwa tidak semua wilayah di Indonesia terjangkau layanan internet yang baik. Perlu adanya kearifan tersendiri dalam proses pembelajaran pada kondisi lingkungan yang seperti itu.

Buku ini dibagi menjadi tiga bab: Bab I tentang Korupsi dan Perburuan Rente di Sektor Jalan, Daging Sapi dan Properti. Bab II tentang Ketimpangan dan Kesejahteraan sebagai dampak Desentralisasi Fiskal, Ketimpangan antar Provinsi di Pulau Jawa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah dan Dampak Pembangunan Wilayah DKI Jakarta terhadap Disparitas DKI Jakarta dengan Luar DKI Jakarta sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Bab III tentang Kelembagaan Ekonomi; Gerakan Koperasi (Perbandingan antara Swedia, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Indonesia), Kelas Menengah dan Liberalisasi Sektor Migas di Indonesia.

Buku ini membahas persoalan dan solusi permasalahan pembangunan (Bangun) dan pengelolaan (Kelola) Infrastruktur Kawasan Permukiman (BK-Infrakim) dengan menggunakan suatu alat bantu (instrument) yang disebut model. Infrastruktur suatu kawasan Permukiman diperlukan untuk mempertahankan diri dari persaingan internasional, mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah serta kesejahteraan masyarakat. [Pustaka Jaya, Dunia Pustaka Jaya]

' Buku ini memuat laporan oleh Asia Competitiveness Institute (ACI) yang diperbaharui setiap tahunnya untuk menganalisis daya saing

Indonesia, baik di 33 provinsi maupun di enam wilayah berdasarkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan 104 indikator yang meliputi empat lingkup, metodologi studi yang unik menggabungkan kekuatan dan kelemahan komparatif serta menerapkan analisis kausalitas Geweke untuk beberapa indikator terkait. Terlepas dari hasil skor dan peringkat, simulasi kebijakan "what if" menawarkan rekomendasi praktis bagi masing-masing provinsi untuk meningkatkan daya saing secara komprehensif serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berimbang, adil, dan berkelanjutan. Analisis kualitatif dan kuantitatif melalui proses kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan memberikan alur yang menarik bagi Indonesia untuk mencapai posisi paling strategis baik dalam konteks regional Asia maupun global. The English version of the book can be found at: 2014 Provincial and Inaugural Regional Competitiveness Analysis: Safeguarding Indonesia's Growth Momentum. Contents: Analisis Peringkat Daya Saing dan Studi Simulasi untuk 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2014 Peringkat Daya Saing Wilayah dan Strategi Pembangunan untuk Indonesia Tahun 2014: Perspektif Kebijakan Kewilayahan Analisis Daya Saing Wilayah Sumatera Analisis Daya Saing Wilayah Jawa Analisis Daya Saing Wilayah Kalimantan Analisis Daya Saing Wilayah Sulawesi Analisis Daya Saing Wilayah Bali-Nusa Tenggara Analisis Daya Saing Wilayah Maluku-Papua Analisis Geweke dalam Hubungan Kausalitas untuk Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur Kata Penutup dan Agenda Penelitian Berikutnya Lampiran 1: Daftar Indikator Lampiran 2: Penghitungan Peringkat: Algoritma Lampiran 3: Catatan Agregasi Data Dari Tingkat Provinsi ke Tingkat Wilayah Readership: Scholars and researchers studying ASEAN economics, in particular Indonesia's. Keywords: Indonesia; Bahasa; Momentum; Provincial; Analysis'

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL, DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA** Penulis : Purwaningsih, S.E, M.Akun Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : April 2021 [www.guepedia.com](http://www.guepedia.com) Sinopsis : Buku ini mencoba mengangkat hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), belanja modal dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder. Sampel penelitian ini adalah 222 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan cluster sampling. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah DAU, belanja modal dan opini audit. Data dianalisis dengan metode regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan opini audit secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian tambahan dengan menambahkan variabel wilayah menunjukkan bahwa wilayah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi dan wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Jawa dan Bali. Buku ini sangat layak untuk menjadi referensi para akademisi dan praktisi di negeri ini. [www.guepedia.com](http://www.guepedia.com) Email : [guepedia@gmail.com](mailto:guepedia@gmail.com) WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Buku ini memaparkan relevansi kajian kebijakan pembangunan perkotaan dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik, khususnya sebagai bagian dari kajian analisis kebijakan secara substantif, yaitu keseluruhan proses pembangunan perkotaan. Pembahasan dimulai dengan membentangkan isu strategis pembangunan perkotaan dan ketersediaan infrastruktur perkotaan di dalamnya mencakup permasalahan demografi, hunian, urbanisasi, transportasi, ketersediaan lapangan pekerjaan, kemiskinan, dan permasalahan pelayanan publik lainnya. Masa pandemi yang penuh tantangan ini memerlukan kolaborasi antar aktor untuk menghasilkan analisa yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang ampuh memulihkan serta memperkuat ekonomi Indonesia. Editor



teringat sekaligus berharap pada Sadli's Law on Indonesian Economic Policy dimana Prof M. Sadli sebagai ekonom senior Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing |v yang pernah menjabat sebagai Menteri Tambang dan Energi menyatakan bahwa "Good times give rise to lazy populis economic policies while crisis times produce good policies. Buku ini adalah upaya mengumpulkan good policies dan good solutions yang terserak di kepala para akademis, pemerintah, profesional di swasta/BUMN, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha Indonesia. Beberapa di antara artikel di buku ini sudah pernah disampaikan idenya di artikel koran, ruang seminar atau jurnal ilmiah, tapi dengan dikumpulkan dalam satu buku maka editor berharap bahwa pemikiran dan solusi lebih mudah di akses dan saling mengisi sehingga lebih panjang masa relevansinya. Buku ini disusun untuk menjawab beberapa permasalahan besar ekonomi Indonesia sehingga dibagi menjadi tujuh kluster yaitu: (1) Transformasi Struktural; (2) SDM, Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Jaminan Sosial, (3) Energi, Infrastruktur, Perhubungan dan Perumahan; (4) Public Finance, Otonomi Daerah, Birokrasi dan Institusi; (5) Industri, Perdagangan, BUMN, UMKM dan Daya Saing; (6) Moneter, Keuangan, Pasar Modal dan Sektor Jasa; (7) Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup

SEBATIK is a collection of research articles, scientific works, and dedication from all academic community in order to integrate information. SEBATIK provides open publication services for all members of the public, both in all tertiary educational and teacher environments and other research institutions, with the freedom to exchange information that is dedicated to facilitating collaboration between researchers, writers and readers through information exchange. SEBATIK was introduced and developed in the STMIK Widya Cipta Dharma environment since 2001 and is wide open for continuous development. SEBATIK is published periodically twice a year, namely June and December, this Journal contains the results of research activities, discoveries and ideas in the field of ICT (Information and Communication Technology) covering the topics of information systems, artificial intelligence, multimedia technology, and others. SEBATIK is also open to topics of research and service outside the field of ICT topics such as topics on public relations, economic improvement, and others. Hopefully with the articles in cultivation researchers can share knowledge in order to advance Indonesia, especially East Kalimantan. ISSN : 1410-3737 E-ISSN : 2621-069X

Economic development of East Asia countries after the 1997 economic crisis.

Pandemi Covid-19 sudah menjadi isu global yang telah menimbulkan dampak yang besar hampir di segala bidang termasuk di ekonomi, sosial, politik, budaya dan pendidikan, serta telah menimbulkan tekanan sosial ekonomi masyarakat. Hampir di seluruh negara mengalami masalah yang dilematis antara menyelamatkan perekonomian negaranya atau keselamatan hidup warganya, yang tentu saja negara tersebut pastinya akan menyelamatkan warga negaranya. Namun hal ini memberikan konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan yang

telah berdampak pada kehidupan sosial termasuk di negara-negara di ASEAN dan khususnya di Indonesia. Kebijakan lockdown di beberapa negara telah menghentikan beberapa bidang ekonomi, sehingga memiliki efek yang sangat signifikan bagi perputaran uang. Diperkirakan separuh lebih aktivitas di bidang ekonomi terhenti karena pandemi Covid-19 ini. Negara Indonesia pun juga harus menghadapi peningkatan jumlah pengangguran, kondisi kinerja yang menurun, aktivitas ekonomi yang melambat dan penyebaran virus yang masih terus meningkat. Pandemi ini juga memberikan dampak yang sangat besar pada dunia pendidikan yang dimana membuat kita terpaksa belajar secara daring serta terbatasnya kondisi infrastruktur yang terbatas seperti kuota yang mahal, sinyal yang belum merata, serta perangkat yang belum sesuai dalam proses belajaran. Berdasarkan kajian terhadap dampak Covid-19 terhadap bidang pendidikan dan ekonomi, khususnya dalam hal terjadinya transformasi paradigma pendidikan dan ekonomi.

Analysis on business competition in Indonesian economic system.

Growth, inequality, and poverty; Public capital e investment; Conceptual framework and model; Data, estimation, and results.

This is the 1st Conference on Islamic Finance and Technology (CIFET), an international conference held by Universitas Muhammadiyah Sidorajo that invites global professionals, academics, independent scholars, and researchers. This conferences supported by Perkumpulan Relawan Jurnal Indonesia, Kresna Nusantara, Ijab qabul.id, and Bank BNI Syariah. It have to meet and exchange the latest ideas and discuss issues concerning all fields of Islamic Banking and Technology. All full paper submissions will be published in Bahasa Indonesia consider within our objectives (1) To provide a forum for all stakeholders in Islamic banking and technology to discuss the current issues, (2) to Promote the Islamic banking and technology more useful, comply and innovate. There is three invited speakers, Prof. Dato' Dr. Azmi Omar (President & Chief Executive Officer INCEIF Malaysia), Abdullah Firman Wibowo (CEO BNI Syariah), and Ronald Wijaya (Chief of Indonesian Sharia Fintech Association - AFSI). There are 37 papers from Indonesia and Uzbekistan that are qualify from various topics. The conference involves Islamic Banking, Hajj Funds, Zakat, Infaq, Sadaqah, Waqf, Crowdfunding, Peer-to-peer Loans, Digital Economy, Financial Technology, Blockchain Technology, Payment Systems, Sharing Economics based on Islam, Islamic Finance, Islamic Monetary.

[Copyright: b7d708f77e97f35fd3f85fb96dde25fc](https://www.researchgate.net/publication/353111111)